



Rencana Kerja (RENJA) TAHUN 2024

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
KABUPATEN BARITO UTARA**

MARET 2023

KATA PENGANTAR

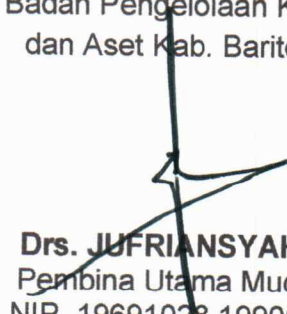
Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 mempunyai arti strategis karena pada tahun tersebut merupakan tahun ke 1 (Satu) pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2024-2026. Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan.

Pada tahun 2024 tetap mengoptimalkan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri 90 Tahun 2020 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Renja Tahun 2024 memuat evaluasi pelaksanaan rencana kerja BPKA tahun yang lalu, Tujuan dan sasaran BPKA, rencana kerja dan dana Indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju. Demikian Renja Perangkat Daerah memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan KUA-PPAS, RKA/DPA SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2024. Melalui Renja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik Pemerintah maupun mitra kerja untuk pembangunan Tahun 2024.

Muara Teweh, Maret 2023.

Kepala
Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Kab. Barito Utara,


Drs. JUFRIANSYAH, M.AP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19691028 199003 1 012

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	I
Daftar Isi	li
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	8
2.3. Isu Penting Penyelenggaraan Tgas Fungsi Perangkat Daerah dan Catatan Strategis	10
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	11
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	11
3.2. Tujuan dan Sasaran	11
3.3. Program dan Kegiatan.....	12
BAB IV PENUTUP	15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kabupaten Barito Utara mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah, mengingat Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renja Tahun 2024 merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukan program kegiatan kedalam Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2024. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2024 yang merupakan tahun ke-1 (Pertama) dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026.

Mengingat arti strategis dokumen Renja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan;

2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan;
3. Program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang;
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Sesuai dengan Tujuan Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Barito Utara ***“Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang efektif, efisien, terkendali, tertib, transparan dan akuntabel”*** dapat mendukung terlaksananya sasaran dan kebijakan strategis Pembangunan Bidang Pemerintahan di Tahun 2024. Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Barito Utara yakni **Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah** untuk mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Untuk dapat mewujudkan Visi dan Misi, maka dalam melaksanakan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis (Resntra) 2024-2026, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kabupaten Barito Utara menyusun Rencana Kerja Tahun 2024.

1.2.Landasan Hukum

Landasan hukum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Barito Utara dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663).
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara No 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2020 Nomor 1);
 9. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 38).

10. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2022 Nomor 37).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2022, dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Barito Utara tahun 2024.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah (PD), proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan R-APBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022, antara lain realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang di rencanakan; faktor – faktor penyebab tidak tercapainya, Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan bagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup yang perlu mendapat perhatian dalam rangka pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan kebutuhan dengan ketersediaan anggaran.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Barito Utara telah menyusun rancangan Rencana Strategis yang telah dipadukan atau telah disinkronisasi dengan Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026. Rencana Strategis ini berorientasi pada hasil (outcome oriented) yang ingin dicapai selama kurun waktu 3 (tiga) tahun, yaitu untuk tahun 2024-2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Berdasarkan fungsi dan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Barito Utara, telah diselenggarakan belanja menurut urusan yaitu urusan wajib dan urusan pilihan yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan.

Amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Tahun 2022 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Tahun 2022 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program/kegiatan, pelaksanaan rencana program/kegiatan, dan hasil rencana program/kegiatan. Untuk dapat mengevaluasi secara komprehensif maka perlu dinilai kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam Renja Perubahan Tahun 2022.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Barito Utara dalam mempertanggungjawabkan akuntabilitas kinerjanya melakukan pengukuran tingkat capaian kinerja tahun 2022 dengan cara membandingkan antara target dan realisasi pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Barito Utara tahun 2022.

Tingkat capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Barito Utara sampai dengan triwulan IV tahun 2022 dapat dilihat pada lampiran 1 yaitu Realisasi Keuangan dan Fisik pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun anggaran 2022.

Pada tahun 2022 telah ditetapkan sasaran strategis yaitu Meningkatnya pengelolaan keuangan dan Aset yang pencapaiannya diukur melalui dua Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022. Capaian Kinerja Tahun 2022 sebagaimana dalam tabel berikut :

Table 2.

Capaian Kinerja berdasarkan Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU).

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Kinerja $6=(5/4 \times 100)$
1	2	3	4	5	
1.	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset	Persentase Penerbitan Dokumen Keuangan Tepat Waktu	100%	100%	100%
		Persentase Tanah Milik Pemerintah Yang Bersertifikat	83,19%	76,10%	91,48%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom-up dan top down*, yang disebut dengan istilah dari *shopping list ke working plan*. Dengan perubahan pola ini akan membawa dampak bahwa pelayanan yang diberikan oleh PD adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh PD yang benar-benar terjangkau dan dibutuhkan oleh masyarakat.

Analisis kinerja pelayanan PD dilakukan dengan pengkajian terhadap capaian indikator kinerja pelayanan PD dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset.

Kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset sangat tergantung kepada :

1. Kondisi pegawai yang memiliki kompetensi artinya mampu menyelesaikan tugas yang dibebankan secara proporsional, mengenali permasalahan yang dihadapi dan dapat memecahkan permasalahan dengan baik dan tuntas. Ini berarti setiap aparat harus dapat meningkatkan potensi dan kapasitas kerja dengan ketekunan melaksanakan tugas, mendalami pelaksanaan tugas serta menambah pengalaman/wawasan.
2. Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan yang jelas artinya adanya kejelasan dalam merumuskan tugas-tugas dan kewenangan dari suatu organisasi dan tidak terjadi tumpang tindih, pelaksanaan tugas serta adanya prosedur dan tata kerja yang jelas.
3. Adanya dukungan sarana dan prasarana dan dukungan pendanaan yang memadai untuk memperlancar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kinerja pelayanan PD kepada masyarakat.

Untuk menganalisis kinerja pelayanan PD digunakan beberapa indikator, antara lain mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dengan sasaran target sesuai dengan Renstra PD dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan.

2.3. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Fungsi Perangkat Daerah dan Catatan Strategis

Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset kabupaten Barito Utara adalah :

1. Dalam pengelolaan dan optimalisasi aset masih diperlukan tenaga yang kompeten di bidang penilaian aset untuk penyusunan neraca guna percepatan laporan keuangan secara keseluruhan
2. Peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola barang daerah.

Rekomendasi dan Catatan Strategi untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset kabupaten Barito Utara adalah :

1. Peningkatan Kompetensi SDM melalui pendidikan di bidang penilaian aset dan dengan koordinasi serta pendampingan dengan Perangkat Daerah dalam membuat neraca untuk mempercepat penyusunan laporan keuangan secara keseluruhan.
2. Meningkatkan pemahaman SDM melalui Bimbingan teknis dan pendampingan untuk pengurus barang dalam pengelolaan barang daerah dari pencatatan aset daerah, barang yang berasal dari pengadaan, mutasi, hibah, penghapusan dan optimalisasi aset untuk peningkatan PAD serta optimalisasi aset bagi pengguna barang Perangkat Daerah.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri terdapat perubahan nomenklatur beberapa Direktorat Jenderal pada Kementerian Dalam Negeri diantaranya adalah perubahan nomenklatur Direktorat Jenderal Keuangan Daerah menjadi Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah. Perubahan nomenklatur tersebut merupakan upaya Kemendagri menjadi poros pemerintahan antara pusat dan daerah, dapat terlaksana dengan baik, sehingga dapat mendukung politik dan pembangunan nasional maupun daerah.

Tugas dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah adalah Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga arah kebijakan yang pertama adalah meningkatkan kualitas dalam memberikan fasilitasi pengelolaan anggaran daerah melalui penetapan pedoman dan standarisasi teknis, pemberian bimbingan teknis, penyediaan data dan informasi keuangan dan evaluasi kinerja anggaran daerah;

Keterkaitannya untuk mendorong tujuan dan sasaran di lingkup daerah maupun nasional ialah berdasarkan Rencana strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Barito Utara yang mendukung visi dan misi Bupati Barito Utara. Untuk mencapai visi tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka Tujuan dari misi kelima yang terkait dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah ***“Terwujudnya Pemerintahan yang baik (Good Governance)”***.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada Visi, Misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis.

Tujuan yang ditetapkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Barito Utara adalah Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang efektif, efisien, terkendali, tertib, transparan dan akuntabel.

Sasaran yang hendak dicapai Badan Pengelolan Keuangan dan Aset Kabupaten Barito Utara adalah Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah.

3.3. Program dan Kegiatan

Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Program menetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*). Penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Barito Utara untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Barito Utara pada Tahun 2024 telah menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Permendagri No 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - d. Adminitrasi Umum Perangkat Daerah

- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan kegiatan :
- a. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
 - b. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
 - c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
 - d. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Daerah Lingkup Keuangan Daerah
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan kegiatan :
- a. Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Barito Utara telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam rangka mengukur capaian kinerja setiap tahunnya. IKU ini ditetapkan dalam Rencana Strategis 2024-2026. Berikut ini IKU yang ditetapkan pada Tahun 2024.

Tabel 3.
Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan
1	2	3
Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah	Persentase penerbitan dokumen keuangan tepat waktu	Jumlah penerbitan dokumen keuangan daerah (Raperda tentang APBD, Raperbup tentang Penjabaran APBD, Raperda tentang Perubahan APBD, Raperbup tentang Penjabaran Perubahan APBD, Raperda Pertanggungjawaban APBD, Raperbup tentang penjabaran Pertanggungjawaban APBD) /Jumlah dokumen keuangan daerah x 100%
	Persentase tanah milik pemerintah yang bersertifikat	Jumlah barang tanah yang bersertifikat/ total bidang tanah x 100%

Tabel 4.
Rencana Kinerja Tahunan 2024

Sasaran 1	Indikator Kinerja Utama 2	Target 3
Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah	1. Persentase penerbitan dokumen keuangan tepat waktu. 2. Persentase tanah milik pemerintah yang bersertifikat.	100,00% 88,03%

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024 untuk mewujudkan Sasaran Pembangunan Bidang Pemerintahan Tahun 2024, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset telah merencanakan 3 program, 13 Kegiatan dan 50 Sub Kegiatan. Matrik Rencana Kerja Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 terdapat pada Lampiran II.

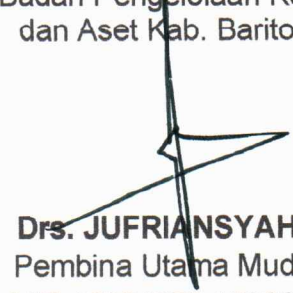
BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Tahun Anggaran 2024 ini dibuat sebagai pedoman atau acuan bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Barito Utara dalam rangka melaksanakan urusan penunjang Pemerintahan dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah sesuai dengan Rencana Strategis BPKA Tahun 2024-2026. Demikian Renja 2024 ini dibuat untuk bahan acuan atau pedoman penyusunan KUA-PPAS Tahun 2024 dan RKA/DPA SKPD Tahun Anggaran 2024.

Muara Teweh, Maret 2023

Kepala
Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Kab. Barito Utara,



Drs. JUFRIANSYAH, M.AP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19691028 199003 1 012

TABEL REALISASI KEUANGAN DAN FISIK BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN BARITO UTARA

[illegible]

No	NOMOR DPA	PROGRAM/KEGIATAN	BELANJA OPERASI				BELANJA MODAL				BELANJA TIDAK TERPUSAK				BELANJA TRANSFER				REALISASI APBD			
			PAGU BELANJA OPERASI (Rp.)	REALISASI KEUANGAN (Rp.)	REAL (%)	REAL FISIK (%)	PAGU BELANJA MODAL (Rp.)	REALISASI KEUANGAN (Rp.)	REAL (%)	REAL FISIK (%)	PAGU BELANJA TIDAK TERPUSAK (Rp.)	REALISASI KEUANGAN (Rp.)	REAL (%)	REAL FISIK (%)	PAGU BELANJA TRANSFER (Rp.)	REALISASI KEUANGAN (Rp.)	REAL (%)	REAL FISIK (%)	PAGU BELANJA TRANSFER (Rp.)	REALISASI KEUANGAN (Rp.)	REAL (%)	REAL FISIK (%)
1		3-4-5-12-16	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.500.000	1.100.000	89,79	100,00													8.150.000	85,79	100,00	
02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumbu Daya Ar dan Listrik	215.764.008	171.507.726	80,42	100,00													173.507.726	80,42	100,00	
03		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Kantor	42.990.000	17.890.250	54,39	100,00													27.990.250	64,39	100,00	
04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	469.302.208	440.840.900	93,94	100,00													443.840.900	93,94	100,00	
5.02.01.2.08		Pembayaran Sewang Muka Daerah Penunjang Unsur Pemerintahan Daerah	81.892.080	48.488.687	75,09	100,00													48.488.687	75,09	100,00	
02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Fask, dan Perawatan Kendaraan Dinas Pemeliharaan/Rehabilitasi	42.227.080	31.380.687	74,31	100,00																
10		Sarana dan Prasarana Gedung Kantor, Bina, Bangunan Lainnya	19.665.000	15.078.000	76,67	100,00																
2.5.02.02		PROJEKSI PENGELUARAN KEUANGAN DAERAH	182.250.877.193	17.168.333.809	83,66	77,40													160.533.037.861	87,86	100,00	81,31
5.02.02.1.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.402.383.125	1.305.481.825	86,79	100,00													1.305.481.825	86,79	100,00	
01		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PMS	110.855.000	107.855.000	97,29	100,00													107.855.000	97,29	100,00	
02		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan APBD	104.855.000	101.855.000	97,14	100,00													101.855.000	97,14	100,00	
03		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD	238.125.000	238.031.229	99,18	100,00																
04		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan APBD dan	241.211.625	238.382.400	97,99	100,00													238.382.400	97,99	100,00	
13		Dinas Pemeliharaan Kabupaten/Kota	707.236.500	841.278.000	96,33	100,00													681.278.000	96,33	100,00	
5.02.02.2.02		Koordinasi dan Pengendalian	21.492.438.243	14.977.951.884	69,34	100,00													14.927.052.884	69,34	100,00	
03		Pengendalian dan Pembast	862.084.000	862.078.000	100,00	100,00													862.078.000	100,00	100,00	
06		Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supaya, Monitoring dan	44.902.000	11.592.500	25,44	100,00													41.592.500	92,14	100,00	
08		Revisi/Revisi Data Pemetaan dan Pengukuran Kas serta	25.585.353.243	14.023.381.884	54,81	100,00													14.023.381.884	54,81	100,00	
5.02.02.3.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Anggaran	863.897.000	643.256.900	69,83	87,50													643.256.900	69,83	86,50	
02		Koordinasi dan Pelaksanaan Anggaran	41.957.500	41.957.000	100,00	100,00													41.957.000	100,00	100,00	
03		Koordinasi dan Pelaksanaan Anggaran	84.877.500	84.877.500	100,00	100,00													84.877.500	100,00	100,00	
04		Koordinasi dan Pelaksanaan Anggaran	119.995.000	130.050.000	91,83	100,00													116.050.800	97,83	100,00	
06		Koordinasi dan Pelaksanaan Anggaran	49.985.000	49.985.000	100,00	100,00													49.985.000	100,00	100,00	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kab. Barito Utara
Tahun 2024

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
SubUnit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset

Kode	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Target Capaian Kinerja / Kinerja Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Tolak Ukur	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
5	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset										
5.02	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN										
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN										
5.02.01.01	Pencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
5.02.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD										
					- Semua Kecamatan, Semua kel/Desa		1 Dokumen			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.988.511,00
5.02.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.095.375,00
5.02.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6.377.438,00
5.02.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD									Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	10.530.975,00
5.02.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	51.571.800,00
5.02.01.07	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
5.02.01.08	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6.334.508.600,00
					- Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa		100% Orang/bulan			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5.617.852.100,00
5.02.01.09	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	199.710.000,00
5.02.01.10	Penyediaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	507.591.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Pencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target
5 02 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	- Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	4.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	1 Laporan	4.725.000,00	
5 02 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	-	Jumlah Laporan Keuangan bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	-	- Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	4.410.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	1 Laporan	4.630.500,00	
5 02 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	55.000.000,00	-	-	68.250.000,00	
5 02 01 2.05 02	Pengadaan Pakian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	Jumlah Paket Pakian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	- Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	60 Paket	-	45.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	60 Paket	47.250.000,00	
5 02 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	- Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Orang	-	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	0 Orang	21.000.000,00	
5 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	364.706.620,00	-	-	382.941.951,00	
5 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	- Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	15 Paket	-	5.767.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	15 Paket	6.055.875,00	
5 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	- Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Paket	-	35.073.120,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	0 Paket	36.826.776,00	
5 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	- Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Paket	-	88.338.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	0 Paket	92.754.900,00	
5 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	- Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Dokumen	-	450.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	0 Dokumen	472.500,00	
5 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	- Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Laporan	-	235.078.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	0 Laporan	246.831.900,00	
5 02 01 2.07	Pengadaan Barrang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	-	-	309.358.610,00	-	-	324.826.541,00	
5 02 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang Disediakan	-	- Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Unit	-	309.358.610,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	0 Unit	324.826.541,00	

Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Hasil Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025						
				Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	
5	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	0 Laporan	-	737.457.216,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	-	9.975.000,00	774.330.076,00
5	02	01	2.08															
5	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	-	-	0 Laporan	-	215.764.008,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	-	226.552.208,00	45.034.500,00
5	02	01	2.08															
5	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	-	0 Laporan	-	42.890.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	-	492.768.368,00	64.986.684,00
5	02	01	2.08															
5	02	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	-	-	0 Laporan	-	469.303.208,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	-	-	-
5	02	01	2.09															
5	02	01	2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dikeluarkan atau Lapangan yang Dikeluarkan dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	Jumlah Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan yang Dikeluarkan atau Lapangan yang Dikeluarkan dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	-	-	0 Unit	-	42.227.080,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dikeluarkan dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit	-	44.338.434,00	20.648.250,00
5	02	01	2.09															
5	02	01	2.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dikeluarkan/Direhabilitasi	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dikeluarkan/Direhabilitasi	-	-	-	0 Unit	-	19.665.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dikeluarkan/Direhabilitasi	0 Unit	-	-	-
5	02	01	2.09															
5	02	02		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	-		-	-	-	2 Dokumen	-	110.895.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	-	116.439.750,00	308.784.363.394,00
5	02	02	2.01															
5	02	02	2.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	-	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	-	-	-	2 Dokumen	-	1402.363.125,00	-	-	-	-	1.472.481.281,00	-
5	02	02	2.01															
5	02	02	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	-	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	-	-	-	2 Dokumen	-	104.895.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	-	110.139.750,00	-
5	02	02	2.01															
5	02	02	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	-	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	-	-	-	2 Dokumen	-	238.125.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	-	250.031.250,00	-
5	02	02	2.01															
5	02	02	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	-	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	-	-	-	2 Dokumen	-	241.211.625,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	-	253.272.206,00	-
5	02	02	2.01															

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Praktikan Naju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				
5 02 02 2.01 13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	-	- Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Orang	-		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	0 Orang	742.598.325,00
5 02 02 2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	-	- Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Dokumen	-		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	0 Dokumen	30.682.462.089,00
5 02 02 2.02 03	Penyapin, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	-	- Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Dokumen	-		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	0 Dokumen	905.198.700,00
5 02 02 2.02 05	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	-	- Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1 Dokumen	47.241.600,00
5 02 02 2.02 09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	-	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan	-	- Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Dokumen	-		Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	0 Dokumen	29.730.021.789,00
5 02 02 2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan	-	- Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-		Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan, Pendapatan-LD, dan Beban	1 Dokumen	696.787.350,00
5 02 02 2.03 02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan	-	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan	-	- Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-		Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan, Pendapatan-LD, dan Beban	1 Dokumen	44.055.375,00
5 02 02 2.03 03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	-	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	-	- Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-		Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	1 Laporan	88.911.375,00
5 02 02 2.03 04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	-	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	-	- Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-		Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan	146.018.250,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Target	Tolok Ukur
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	-	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	-	- Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	11 Dokumen	-	49.985.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	52.484.250,00				
5.02.02.2.03.07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Terbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Terbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	-	- Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	786.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Terbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	825.300,00				
5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	-	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	-	- Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Dokumen	-	149.950.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	157.447.500,00				
5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	-	- Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Orang	-	154.031.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	161.732.550,00				
5.02.02.2.03.13	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	-	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	-	- Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Laporan	-	43.155.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	45.312.750,00				
5.02.02.2.04.08	Peninjauan Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyelenggaraan Bantuan Keuangan	-	- Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Laporan	-	226.394.139.000,00	Dana Desa, Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyeluran Bantuan Keuangan	237.713.845.950,00				
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	-	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	-	- Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	32.526.097.144,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	34.152.402.001,00				
5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	-	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	-	- Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	3.643.163.355,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	3.425.321.523,00				
5.02.02.2.05.02	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah	-	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah	-	- Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Dokumen	-	149.707.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Dokumen Hasil Impementasi dan Peneliharaan Sistem Informasi Pemerintahan Bidang Keuangan Daerah	157.192.875,00				

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)	Target
5 02 02 2.05 03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	-	- Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Orang	-	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		0 Orang	83.870.325,00
5 02 03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH											973.456.050,00
5 02 03 2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah								927.101.000,00			973.456.050,00
5 02 03 2.01 01	Penyusunan Standar Harga	-	Jumlah Standar Harga yang Disusun	-	- Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	2 Dokumen	-	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		2 Dokumen	52.498.425,00
5 02 03 2.01 05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	-	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	-	- Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1 Laporan	664.842.150,00
5 02 03 2.01 11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	-	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	-	- Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1 Laporan	5.249.475,00
5 02 03 2.01 12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	-	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	-	- Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1 Laporan	93.996.000,00
5 02 03 2.01 13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	-	- Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Orang	-	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		0 Orang	156.870.000,00
							TOTAL		302.651.168.949,00			317.794.227.397,00

Muara taweh, Maret 2023
Kepala Badan pengelolaan Keuangan dan Aset
Kabupaten Barito Utara

Drs. JUFRIANSYAH, M.AP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 1969108 199003 1 012